

Implementasi Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru Masa Kini di UPT SD Negeri 13 Bontolebang

Andi Ati¹, Rosdiana²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 24, 2025

Available online June 25, 2025

Kata Kunci

Sertifikasi Guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Implementasi Penelitian

Keywords

Teacher Certification, Teacher Professional Education (PPG), Research Implementation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru di UPT SD Negeri 13 Bontolebang, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi dan PPG, kepala sekolah, serta pengawas bina. Teknik pengelolaan data menggunakan reduksi data, display data, verifikasi data, dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sertifikasi dan PPG di UPT SD Negeri 13 Bontolebang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat hambatan dalam hal keterbatasan fasilitas teknologi, dukungan pelatihan lanjutan, dan akses informasi kebijakan. Guru yang telah mengikuti program menunjukkan peningkatan dalam perencanaan pembelajaran, penguasaan materi, dan penggunaan strategi pembelajaran aktif. Implementasi penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan PPG berkontribusi dalam membangun kompetensi profesional guru yang lebih kuat, serta mendorong terciptanya proses

pembelajaran yang lebih berkualitas. Temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi dinas pendidikan dan sekolah untuk merancang kebijakan dan program pembinaan berkelanjutan yang lebih kontekstual dan terarah.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the teacher certification and Teacher Professional Education (PPG) programs and their impact on improving teacher competence at UPT SD Negeri 13 Bontolebang, Takalar Regency. This research used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation. The informants in this study were teachers who had participated in certification and PPG, the school principal, and the supervising officer. Data were analyzed using data reduction, data display, verification, and validity testing through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The results showed that the implementation of certification and PPG programs at UPT SD Negeri 13 Bontolebang has proceeded fairly well, although there are still obstacles related to limited technological facilities, lack of follow-up training, and incomplete access to policy information. Teachers who completed the programs demonstrated improvements in lesson planning, content mastery, and active learning strategies. The implementation of this research highlights that certification and PPG contribute significantly to strengthening teachers' professional competence and fostering more effective and quality-oriented learning processes. These findings can serve as a reference for education offices and schools to design more contextual and targeted professional development programs.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, peran guru sebagai ujung tombak pendidikan menjadi sangat krusial. Guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, kualitas guru perlu senantiasa ditingkatkan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui program sertifikasi dan pendidikan profesi guru (PPG).

Di Indonesia, kebijakan sertifikasi guru telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dalam perjalanannya, sertifikasi guru mengalami berbagai perubahan kebijakan, termasuk peralihan dari

*Corresponding Author

Email: andiati03100@gmail.com, rosdianasaid@uin-alauddin.ac.id

jalur portofolio ke jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan dan prajabatan. PPG dirancang sebagai sebuah proses pendidikan lanjutan yang memberikan penguatan dalam bidang pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru yang telah mengikuti PPG dan memperoleh sertifikat pendidik dianggap telah memenuhi standar kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi dan PPG tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Di beberapa satuan pendidikan, termasuk di sekolah dasar negeri yang berada di wilayah-wilayah pinggiran atau daerah tertinggal, ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya akses informasi, keterbatasan fasilitas, kendala administratif, hingga resistensi dari sebagian guru terhadap proses sertifikasi. Salah satu contoh konkret yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah UPT SD Negeri 13 Bontolebang, sebuah sekolah dasar yang terletak di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan dukungan teknis.

UPT SD Negeri 13 Bontolebang merupakan salah satu institusi pendidikan dasar di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sekolah ini menampung peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Seiring dengan tuntutan profesionalisme guru, implementasi program sertifikasi dan PPG menjadi sangat penting di sekolah ini. Namun, berdasarkan pengamatan awal dan wawancara dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa indikasi adanya kendala dalam pelaksanaan program tersebut, baik dari sisi partisipasi guru, pemahaman terhadap substansi PPG, hingga dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

Masalah utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sertifikasi dan pendidikan profesi guru masa kini di UPT SD Negeri 13 Bontolebang, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menyoroti permasalahan ini secara lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual implementasi kebijakan sertifikasi dan PPG di tingkat satuan pendidikan dasar, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dalam kebijakan pendidikan nasional.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada pentingnya peningkatan kualitas guru secara individual, tetapi juga dalam konteks sistemik, yaitu bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke satuan pendidikan yang paling dasar. Penelitian ini juga berupaya memberikan masukan kebijakan (*policy input*) yang dapat memperbaiki skema pelaksanaan PPG dan sertifikasi guru, agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan demikian, berdasarkan pendahuluan ini menjelaskan bahwa pada pemahaman bahwa sertifikasi dan pendidikan profesi guru bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan proses strategis dalam membentuk profesionalisme guru secara utuh. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut dengan fokus pada satu studi kasus yang representatif, yakni UPT SD Negeri 13 Bontolebang.

TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanun (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi penyelenggaraan PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten". Peneliti menemukan bahwa seluruh aspek input seperti kualifikasi peserta, dosen, dan sarana prasarana berada dalam kategori baik. Proses pelaksanaan PPG yang terdiri dari pembelajaran daring, *workshop*, *peer teaching*, dan praktik lapangan terlaksana dengan cukup efektif meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penilaian pengetahuan. Penelitian ini menekankan pentingnya proses dan output PPG sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, serta perlunya pembenahan sistem evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Alam, Sumantri, dan Khaerudin (2021) yang berjudul "Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan pada masa pandemi Covid-19". Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dilakukan dalam situasi terbatas, pelaksanaan PPG tetap berjalan dengan baik dan tertata. Guru-guru peserta PPG mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mereka, terutama karena dorongan untuk menguasai teknologi informasi dalam pembelajaran daring. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dukungan sistem yang memadai, PPG dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas guru, bahkan di masa krisis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syamel dan Jusman (2024) meneliti "Peran sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat status profesional guru serta meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Namun, peneliti juga mencatat bahwa pelaksanaan sertifikasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan konsistensi

dukungan dari pihak institusi pendidikan, seperti kepala sekolah dan pengawas, yang memiliki peran penting dalam pembinaan pascasertifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sertifikasi tidak hanya bergantung pada kelulusan formal, tetapi juga pada keberlanjutan pembinaan dan penerapan kompetensi guru di lapangan.

METODE

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana implementasi sertifikasi dan pendidikan profesi guru (PPG) dijalankan di UPT SD Negeri 13 Bontolebang. Jenis penelitian ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengungkap dinamika, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh para guru dan pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi dan PPG di tingkat satuan pendidikan dasar. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena UPT SD Negeri 13 Bontolebang merupakan sekolah yang mewakili kondisi daerah dengan keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan dukungan teknis, yang berpengaruh terhadap implementasi program profesionalisasi guru dan tempat peneliti mengajar.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru-guru yang telah maupun belum memiliki sertifikat pendidik, guru yang telah mengikuti PPG, serta tenaga kependidikan lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam untuk menggali pemahaman dan pengalaman informan, observasi langsung terhadap praktik pembelajaran dan dinamika sekolah, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti data guru bersertifikasi, sertifikat PPG, dan laporan kegiatan pengembangan profesi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik menurut Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, melakukan konfirmasi hasil wawancara melalui *member check*, serta berdiskusi dengan kolega peneliti dalam bentuk *peer debriefing*. Selain itu, peneliti juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak sekolah dan menjelaskan tujuan penelitian kepada seluruh informan, menjaga kerahasiaan identitas partisipan, serta memberikan hak kepada mereka untuk berpartisipasi secara sukarela. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai implementasi sertifikasi dan PPG di sekolah dasar, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas di UPT SD Negeri 13 Bontolebang.

HASIL

Pengertian Sertifikasi Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikasi adalah “penyertifikatan”. Sertifikasi merupakan bentuk bukti secara formal di mana memberikan pengakuan dengan memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik profesional. Sertifikasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional karena telah mempunyai sejumlah kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran”. Sertifikasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional yang telah memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran. Sertifikasi juga berarti diploma atau mengakui secara resmi terhadap suatu kemampuan atau kompetensi seseorang yang memiliki jabatan profesional yang berasal dari kata bahasa Inggris “*certification*”.

Surat keterangan atau dikenal dengan sertifikat yang diberikan kepada profesi diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk menyatakan kelayakan sebuah profesi dalam melakukan tugas juga merupakan istilah dari sertifikasi. Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan.

Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan mengenai sertifikasi adalah memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik yang sudah memenuhi persyaratan dan mempunyai sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji dari pemerintah. Sertifikasi ini menjadi rencana atau kebijakan

pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Menurut *National Commission on Educational Services* (NCES), sertifikasi adalah prosedur yang digunakan dalam menetapkan seorang calon guru layak atau tidak untuk mendapatkan izin dan wewenang untuk mengajar. sertifikasi merupakan kegiatan uji kompetensi guna memperoleh sertifikat sebagai pendidik, dan uji kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus dimiliki sehingga ia dikatakan layak mendapatkan sertifikat. sertifikasi profesi guru merupakan proses di mana guru yang sudah mampu memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditentukan dapat menerima sertifikat.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, sertifikasi adalah suatu proses memberikan sertifikat dari lembaga yang berwenang kepada tenaga pendidik baik guru maupun dosen yang sudah memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang sudah ditentukan sebagai bentuk pengakuan menjadi tenaga yang profesional. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa guru tersebut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang sesuai dengan standar nasional. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru sebagai tenaga profesional.

Tujuan Sertifikasi Guru

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sertifikasi guru menjadi hal yang penting. selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga memiliki tujuan. Tujuan utama sertifikasi guru adalah:

1. Menjamin Kompetensi Guru: Memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.
2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran: Melalui peningkatan kompetensi guru, diharapkan kualitas pembelajaran di kelas juga meningkat.
3. Memberikan Penghargaan Profesional: Memberikan pengakuan terhadap profesionalisme guru melalui pemberian tunjangan profesi.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Guru: Melalui tunjangan profesi, diharapkan kesejahteraan guru meningkat.

Sertifikasi dilakukan untuk kebaikan bagi guru sendiri, lembaga, dan juga masyarakat. Adapun sertifikasi guru memiliki manfaat diantaranya yaitu:

- 1) Memberi perlindungan terhadap profesi guru agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang mengakibatkan rusaknya citra guru.
- 2) Masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Sertifikasi yang dilakukan oleh guru akan memberikan manfaat bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dari tekanan baik secara internal dan eksternal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Sertifikasi Guru

Proses sertifikasi guru dilakukan melalui dua jalur:

1. Jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG). Maksudnya Guru mengikuti program PPG yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat.
2. Jalur Portofolio. Maksudnya Guru mengumpulkan portofolio yang menunjukkan bukti-bukti kompetensi yang dimiliki, yang kemudian dinilai oleh asesor.

Setelah mengikuti salah satu jalur tersebut dan dinyatakan lulus, guru akan mendapatkan sertifikat pendidik yang menjadi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi.

Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Kemampuan Diri Guru

Sertifikasi guru merupakan proses mendapatkan sertifikat bagi guru profesional yang telah memenuhi standar. Dalam meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas pastinya dibutuhkan seorang guru yang profesional. Guru yang telah lulus uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi akan mendapatkan sertifikat. Kompetensi dalam hal ini bukan hanya sekedar tatanan pengetahuan saja melainkan kompetensi juga tercerminkan pada pola perilaku. Kompetensi ialah sikap, nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan yang terpadu dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku. Maka untuk lulus uji kompetensi seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional yang baik. Sertifikasi merupakan bukti dari keprofesionalan seorang guru.

Pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 dijelaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru

sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Seorang guru yang profesional selaluberupaya untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Kualifikasi kemampuan diri pada guru yang profesional ini berkaitan dengan kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. Sertifikasi guru yang menuntut keprofesionalan guru dalam menjalankan tugas sebagai pengajar membuat guru harus terus berupaya meningkatkan kemampuan diri untuk bisa menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan efisien. Hendaknya guru yang sudah telah memiliki sertifikat juga meningkatkan kemampuan diri sebagai pengajar dengan mampu membuat bahan ajar serta media pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan dalam mengajarkannya. Guru juga harus mampu mengikuti perkembangan IPTEK, menguasai model, metode, media pembelajaran sehingga bisa diterapkan dikelas sebagai wujud profesionalitasnya. Sesuai dengan peraturan yang ada atau undang-undang maka tujuan sertifikasi guru dapat dikatakan antara lain adalah: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) meningkatkan profesionalitas guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan guru; (3) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; dan (4) meningkatkan martabat guru. Tujuan sertifikasi guru yang ideal tersebut tampaknya sebagian besar belum dapat terwujud dalam tataran implementasi, terutama dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.

Implementasi sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejatinya bukan hanya sebagai upaya administratif atau formalitas struktural, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual seorang guru sebagai agen perubahan. Dalam perspektif Islam, guru adalah pewaris tugas para nabi dalam menyampaikan ilmu dan membimbing umat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui PPG dan sertifikasi merupakan bagian dari amanah besar dalam pendidikan. Hal ini ditegaskan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firman dalam QS Al-Mujadilah: 11.

Terjemahannya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ilmu adalah pintu kemuliaan dan guru yang terus meningkatkan ilmunya akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Proses sertifikasi dan PPG menjadi bentuk konkret dari upaya peningkatan kualitas keilmuan dan keprofesionalan tersebut. Selain itu, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam QS Az-Zumar: 9.

Terjemahannya: Katakanlah: 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Ayat diatas menegaskan bahwa guru yang berilmu dan terus belajar memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak dan berpengetahuan. Maka, profesionalisme guru yang diwujudkan melalui sertifikasi tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai Qur'ani dalam dunia pendidikan.

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana atau diploma empat yang mempersiapkan lulusan untuk menjadi guru profesional. PPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Tujuan Pendidikan Profesi Guru adalah:

1. Meningkatkan Kompetensi Guru seperti meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru.
2. Mempersiapkan Guru Profesional seperti Mempersiapkan guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik secara profesional.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan seperti Melalui peningkatan kompetensi guru, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah meningkat.

Teori Implementasi Kebijakan Publik: Model George C. Edward III

Untuk menganalisis implementasi sertifikasi dan PPG di UPT SD Negeri 13 Bontolebang, digunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III, terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*): Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi yang jelas dan konsisten diperlukan agar pelaksana kebijakan memahami tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil.
2. Sumber Daya (*Resources*): Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi (*Disposition*): Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Sikap positif dan komitmen tinggi dari pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan dalam organisasi birokrasi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif dapat mendukung implementasi kebijakan.

Keempat variabel ini saling terkait dan harus berjalan secara simultan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sertifikasi dan PPG di UPT SD Negeri 13 Bontolebang.

PEMBAHASAN

Kondisi Umum UPT SD Negeri 13 Bontolebang

UPT SD Negeri 13 Bontolebang adalah sekolah dasar negeri yang berlokasi di daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas, baik dari segi jaringan internet, fasilitas pembelajaran, maupun ketersediaan sumber daya manusia pendukung. Sekolah ini memiliki sejumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dan sebagian besar merupakan guru yang telah lama mengabdikan. Sebagian dari mereka sudah mengikuti sertifikasi dan PPG, namun sebagian lainnya masih dalam tahap perencanaan atau belum memiliki akses untuk ikut serta.

Implementasi Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru di sekolah ini umumnya dilaksanakan melalui jalur PPG dalam jabatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi merasakan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Namun demikian, sertifikasi belum sepenuhnya mampu mengubah praktik pembelajaran secara signifikan bagi sebagian guru, terutama mereka yang mengikuti proses secara administratif tanpa pemahaman mendalam terhadap kompetensi yang ditargetkan.

Proses sertifikasi dianggap cukup membebani dari sisi administrasi, terutama dalam hal penyusunan portofolio dan mengikuti pelatihan daring. Ketersediaan perangkat dan jaringan yang tidak stabil menjadi tantangan tersendiri. Kendati demikian, beberapa guru menyatakan bahwa proses sertifikasi membuat mereka lebih termotivasi untuk mengembangkan kompetensi diri dan lebih reflektif dalam mengelola kelas.

Implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)

PPG dianggap sebagai program yang sangat penting dalam membekali guru dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara menyeluruh. Guru-guru yang telah mengikuti PPG menyatakan bahwa pelatihan yang mereka terima sangat membantu dalam memahami model pembelajaran aktif, pembuatan RPP berbasis HOTS, serta pentingnya penilaian otentik. PPG juga membuka wawasan guru tentang pembelajaran berbasis digital dan penggunaan teknologi.

Namun, beberapa kendala utama ditemukan dalam pelaksanaan yaitu:

1. Teknis dan Akses: Tidak semua guru memiliki perangkat memadai dan jaringan internet yang stabil untuk mengikuti perkuliahan daring.
2. Waktu dan Beban Kerja: Guru yang mengikuti PPG seringkali kesulitan membagi waktu antara tugas mengajar dan kegiatan PPG.
3. Minimnya Pendampingan: Setelah menyelesaikan PPG, guru merasa belum mendapatkan pembinaan lanjutan secara sistematis dari pengawas atau kepala sekolah.

Analisis Implementasi Berdasarkan Model Edward III

1. Komunikasi

Sosialisasi kebijakan mengenai sertifikasi dan PPG masih bersifat sporadis. Banyak guru tidak mengetahui dengan jelas prosedur, jadwal, dan perubahan kebijakan terbaru. Informasi seringkali hanya diterima melalui grup WhatsApp atau rekan sejawat, bukan dari saluran resmi atau pelatihan yang terstruktur.

2. Sumber Daya

Fasilitas seperti komputer, akses internet, dan media pembelajaran sangat terbatas. Dukungan dari pemerintah daerah juga belum optimal dalam menyediakan sarana untuk mengikuti PPG secara daring. Selain itu, jumlah tenaga administrasi di sekolah sangat terbatas, membuat guru harus mengurus proses administratif sendiri.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap guru terhadap PPG dan sertifikasi cukup beragam. Sebagian guru sangat antusias dan menganggap program ini sebagai peluang pengembangan diri. Namun, sebagian lainnya merasa program ini terlalu formal dan menambah beban tanpa ada pembinaan konkret di lapangan. Komitmen kepala sekolah sangat menentukan, dan di sekolah ini, kepala sekolah menunjukkan dukungan yang cukup kuat terhadap pengembangan profesional guru.

4. Struktur Birokrasi

Koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan LPTK masih kurang terintegrasi. Terkadang ada ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dengan format pelatihan yang diberikan oleh LPTK. Selain itu, prosedur administratif yang panjang dan berbelit menyebabkan keterlambatan dalam pencairan tunjangan profesi maupun pendaftaran PPG.

Dampak Program terhadap Guru dan Pembelajaran

Implementasi sertifikasi dan PPG telah memberikan pengaruh positif terhadap sebagian guru dalam hal:

1. Peningkatan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran yang sistematis.
2. Peningkatan pemahaman terhadap pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada murid.
3. Meningkatnya motivasi karena insentif profesional.

Namun, program ini masih belum berdampak signifikan secara merata karena keterbatasan infrastruktur, informasi, dan keberlanjutan program pengembangan pasca-PPG. Oleh karena itu, dampak maksimal dari kebijakan ini hanya bisa dicapai bila disertai pembinaan berkelanjutan dan dukungan kelembagaan.

KESIMPULAN

Implementasi sertifikasi dan PPG di UPT SD Negeri 13 Bontolebang berjalan dengan segala keterbatasan dan tantangan. Meski memiliki dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh lemahnya komunikasi kebijakan, kurangnya fasilitas, serta belum adanya sistem pendampingan berkelanjutan. Perlu adanya kebijakan afirmatif dan kontekstual dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar program sertifikasi dan PPG benar-benar dapat menjangkau dan menjawab kebutuhan nyata guru.

REFERENSI

- Adhar, M. 2013. *Sertifikasi Guru dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 7(2), 45-58.
- Harsono, S. 2010. *Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hasmiah. 2020. *Peran Guru Salam Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Indonesia
- Kusnandar, A. 2009. *Sertifikasi Guru: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mulyasa. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salma, I. 2016. *Penerapan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 18(3), 115-127.
- Hanun, F. (2021). Implementasi penyelenggaraan program PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(3), 268-285.
- Alam, S., Sumantri, M. S., & Khaerudin. (2021). Implementasi program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan bidang studi guru kelas SD di era Covid-19. *Jurnal Elementary School*, 5(1), 25-34.
- Syamel, S. S., & Jusman, J. (2024). Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Makassar. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1224-1232.